

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik menjadi salah satu hal yang hampir pasti menciptakan sikap pro dan kontra, serta mempengaruhi kondisi internal Muhammadiyah. Wacana tentang perlu atau tidaknya terjun dibidang politik praktis selalu menjadi agenda hangat didiskusikan dan dilakukan penelitian. Kenyataan ini terjadi setelah melihat banyaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah berpartisipasi secara aktif didalam pemerintahan dan partai politik di Indonesia. Model hubungan Muhammadiyah dengan politik memang dipengaruhi oleh sikap Muhammadiyah terhadap pola yang sedang berkembang (Harianto, 2005: 2-3).

Berkembangnya pola tersebut menjadikan hubungan Muhammadiyah dengan politik dipertegas dalam Khittah Muhammadiyah Denpasar Tahun 2002. Khittah Denpasar menjelaskan tentang posisi umum Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Khittah tersebut menyatakan bahwa Muhammadiyah memiliki posisi sebagai *moral face* (kekuatan moral) dan *interest group* (kelompok kepentingan) dalam kehidupan berbangsa di Negara Indonesia. Khittah Denpasar berpijak pada Khittah Tahun 1971 (Ujung Pandang) yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan

partai politik, sehingga memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai hak asasinya (Nashir, 2008: 35-39).

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang (Makasar), Muhammadiyah menyatakan sikap untuk netral terhadap partai politik dan terus dipertahankan oleh Muhammadiyah. Sikap netral terhadap partai politik bertujuan untuk menghindari konflik-konflik yang dapat merugikan Muhammadiyah. Jika partai politik bersikap pragmatis, Muhammadiyah mempunyai tujuan yang lebih luas yakni membangun umat. Sikap netral Muhammadiyah, baik secara kelembagaan atau perorangan bukan berarti Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiyah pasti akan terlibat dan terus bermain dalam kancah perpolitikan baik nasional maupun lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiawan, 2013: 38-46).

Keterlibatan Muhammadiyah salah satunya ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan reformasi dalam menciptakan tatanan politik dan format pemerintahan yang baru. Amien Rais yang merasa terpenggil oleh keadaan dan situasi tersebut akhirnya terjun ke panggung politik praktis dan meletakkan jabatan sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Ahmad Syafii Ma'arif. Amien Rais memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Tahun 2004. Amien Rais yang merupakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menjadikan PAN sebagai kendaraan untuk berjuang diranah politik. Pencalonan Amien Rais melalui kendaraan Partai Amanat Nasional (PAN) menuai kendala karena harus memenuhi perolehan suara dalam pemilu legislatif sesuai ketentuan Undang-Undang Pilpres. Oleh

sebab itu Muhammadiyah merasa memiliki kewajiban memberi dukungan kepada kadernya, dukungan ini juga merupakan wujud kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dengan begitu PAN memperoleh rekomendasi legitimasi sebagai partai pilihan utama warga Muhammadiyah. (Jurdi, 2010: 131-132).

Persoalan hubungan Muhammadiyah dengan politik memang selalu memunculkan dinamika tersendiri. Proses pemilihan Kepala Daerah juga menimbulkan perilaku dan sikap yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan tarik ulur antara kepentingan politik personal, warga dan elitnya. Kecenderungan menarik lembaga Muhammadiyah untuk terjun langsung atau tetap pada posisi gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut (Mukhlis, 2015: 21-22).

Di tatanan lokal, pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman membuat fatwa khusus untuk mendukung calon yang berlatar belakang dari Muhammadiyah yaitu pasangan Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo yang diusung oleh PDI-P dan PAN, sedangkan lawannya adalah pasangan Hafidh Asrom dan Kusbaryanto yang didukung oleh PKB dan PKS. Pasangan Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Sleman dengan perolehan suara 39,6% sedangkan pasangan Hafidh Asrom dan Kusbaryanto memperoleh suara 33,9% (Nurmandi dalam Qodir, 2015: 122).

Kemudian pada Tahun 2010 secara terang-terangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman memobilisasi dukungan politik bagi pasangan Sri Purnomo dan Yuni Satia yang diusung oleh Partai gabungan PAN, PDI-P, dan Gerindra dan berhasil meraih suara terbanyak 174.571 suara (35,18%). Sedangkan di Kabupaten Maros pada Pemilihan Kepala Daerah 2010 sikap Pimpinan Daerah Muhammadiyah secara tersirat memberikan himbauan untuk memperjuangkan dan memilih kandidat yang berlatar belakang Muhammadiyah, dan dukungan tersebut mengarah kepada pasangan M.M Hatta Rahman dan Andi Hamril Mattotorang tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 66.138 suara (38,62%) (Nurmandi dalam Qodir, 2015: 116)

Pada Tahun 2011, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta juga diwarnai dengan tarik-menarik dukungan dari Muhammadiyah. Pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono yang terbentuk dari koalisi PDI-P dan Golkar menghadapi kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terbesar di Yogyakarta melakukan strategi membiarkan PKS mendukung RUUK untuk memecah suara agar hasil akhir tidak berujung ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pasangan Haryadi dan Imam Priyono juga melakukan strategi yaitu dengan membuat forum Forodi yang beranggotakan mantan pengurus Muhammadiyah yang memiliki rasa sakit hati dengan Amien Rais. Sedangkan disisi lain terdapat pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun dengan posisi Hanafi Rais sebagai putra dari Amien Rais, dan disaat bersamaan Hanafi rais juga dekat Muhammadiyah. Pasangan berikutnya

yaitu Zuhri dan Auliya Reza yang berasal dari PKS, dan basis massa PKS juga berasal dari Muhammadiyah. Pada akhirnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dimenangkan oleh Haryadi dan Imam Priyono, disamping hal tersebut pasangan Imam Priyono berhasil melakukan strategi politiknya (Ula, 2013: 179-182).

Pada pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi tahun 2010-2015, elit-elit Muhammadiyah mengarahkan warganya untuk mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati pilihannya. Kelompok pertama adalah kelompok elit yang mengarahkan dukungan pada pasangan Ir. H. Jalal, M.Si dan Drs. H. Yusuf Nur Iskandar dengan alasan karena salah satu pasangan berasal dari keluarga Muhammadiyah. Kelompok kedua adalah kelompok elit yang mengarahkan dukungan pada pasangan H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. dan Yusuf Widiyatmoko, S.Sos dengan alasan bahwa pasangan calon lebih komunikatif dengan anak muda di Banyuwangi. Kelompok ketiga adalah kelompok elit Muhammadiyah yang mengarahkan dukungan pada pasangan Hj. Emilia Contreas dan H. A. Zaenuri Ghazali dengan alasan pasangan calon yang didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Perilaku tersebut mengelompokkan pilihan elit-elit Muhammadiyah yang mendukung kandidat calon dan masing-masing kelompok elit Muhammadiyah bergerak mempengaruhi warga di tingkat Cabang dan Ranting Muhammadiyah sesuai dengan kecerdasan dan caranya untuk mendukung dan memilih Bupati dan Wakil Bupati yang didukungnya supaya menang didalam Pemilihan Kepala Daerah Banyuwangi 2010-2015 (Mukhlis, 2015; 23)

Pada perhelatan pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 juga memberikan daya tarik bagi Muhammadiyah dalam menentukan langkahnya dibidang politik. Hal tersebut dikarenakan beberapa kandidat calon membidik dukungan suara dari Muhammadiyah. Pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 adalah Walikota Haryadi Suyuti berpasangan dengan Heroe Poerwadi yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP. Sedangkan Wakil Walikota Imam Priyono berpasangan dengan Achmad Fadli yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem dan PKB (Mulyadi, 2011, Calon Kuat Pemenang, <http://regional.kompas.com>. 25/09/11).

Pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli mencoba membidik dukungan dari Muhammadiyah, karena Organisasi Muhammadiyah memiliki peran penting di Kota Yogyakarta, serta memiliki massa yang cukup besar di Kota Yogyakarta, sehingga dapat membantu dari segi suara dan strategi dalam memenangkan pasangan calon Imam Priyono dan Achmad Fadli (<http://jogjatv.tv> 02/03/16). Disisi lain pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi juga mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah, bahkan Heroe Poerwadi merupakan Ketua DPD PAN yang sekaligus kader Muhammadiyah juga. Dengan begitu, ada kedekatan secara kultural dengan Muhammadiyah untuk memudahkan pasangan calon dalam berkomunikasi dengan Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 (Hanafi, Muhammadiyah tegaskan tak berpolitik praktis, <https://daerah.sindonews.com> 27/04/16).

Melihat beberapa persoalan tersebut, sikap politik dan kecenderungan Muhammadiyah didalam menghadapi Pemilihan Umum mengindikasikan adanya keinginan untuk terlibat didalam politik dan terlibat didalam perebutan kekuasaan. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana sikap netralitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah apakah Muhammadiyah tetap dengan prinsip netral sesuai Khittahnya atau Muhammadiyah benar-benar terjun secara kelembagaan atau individu di dalam perpolitikan yang sedang terjadi. Penelitian ini difokuskan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017, karena melihat kondisi yang terjadi bahwa masing-masing dari calon Walikota dan Wakil Walikota yang bertarung di Pilkada Kota Yogyakarta memperebutkan dukungan dan suara dari Muhammadiyah. Muhammadiyah dinilai sebagai Organisasi Islam yang sudah lama berdiri di Kota Yogyakarta dan berpengaruh besar pada kondisi dan dinamika politik yang ada di Kota Yogyakarta (Hanafi, 2016, Bakal Calon Berebut Suara Muhammadiyah dalam Koransindo.com, 21/04/16).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana bentuk netralitas yang diwujudkan Muhammadiyah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap dan strategi politik Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan menguji netralitas politik Muhammadiyah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan secara mendasar baik kepada penulis maupun kepada masyarakat luas tentang netralitas politik Muhammadiyah dalam pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dilakukan agar penulis mampu secara langsung turun ke lapangan melihat kondisi dan dinamika politik Muhammadiyah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Yogyakarta serta dapat menjelaskan dan menjadi bahan informasi kepada khalayak tentang sikap yang



diambil Muhammadiyah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu didapat dan diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketepatan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Hal yang akan diperoleh dalam kajian pustaka adalah peneliti memperoleh teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi penelitian dan informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan (Purwono, 2010: 1-17).

Kajian pada tinjauan pustaka ini akan menyesuaikan dengan tema penelitian yang berkaitan yaitu tentang bagaimana bentuk netralitas politik Muhammadiyah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017. Studi pustaka yang membahas tentang Muhammadiyah dengan politik memang sudah sangat banyak, tentang bagaimana sikap, perilaku dan pandangan politik Muhammadiyah di aras lokal maupun nasional. Studi pustaka berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain tentang Muhammadiyah dan politik akan dipaparkan kembali sesuai topik penelitian yang dilakukan.

Suwarno (2001: 1-222) dalam bukunya tentang “Muhammadiyah Sebagai Oposisi” memfokuskan kajiannya tentang fenomena perubahan perilaku politik Muhammadiyah periode 1995-1998. Suwarno mencoba mengamati dari perspektif historis, yakni paradigma gerakan Muhammadiyah mulai dari berdirinya Muhammadiyah hingga mundurnya Amien Rais dari kepemimpinan Muhammadiyah. Peneelitiannya menghasilkan kesimpulan antara lain *Pertama*: sikap dan perilaku politik Muhammadiyah dalam perspektif historis. *Kedua*: dinamika internal perpolitikan Muhammadiyah 1995-1998. dan *Ketiga*: hubungan Muhammadiyah vis a vis dengan pemerintah Orde Baru. Dalam hal ini fenomena baru yang ditampilkan oleh Amien Rais sangat mempengaruhi dinamika politik Muhammadiyah.

Sholikin (2015: 158-161) dalam tesisnya tentang “Deviasi Sikap Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah (Studi Kasus Sikap Politik Elit Muhammadiyah Pada Pemilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros)” Sholikin membahas dan mengkaji bagaimana bentuk netralitas politik electoral Muhammadiyah dan mengapa terjadi deviasi netralitas politik electoral Muhammadiyah antara pimpinan pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah mendasarkan semua keputusannya pada Khittah politik Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat

Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini dibagi dalam kelompok moderat, kelompok inklusif dan eksklusif, pembagian ini selanjutnya akan menentukan bagaimana para elite tersebut menentukan pilihan politiknya dalam Pilihan Presiden 2014 yang semua penduduk Indonesia terbelah menjadi dua kubu. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Penelitian ini mengambil Kabupaten Sleman dan Maros sebagai kabupaten yang didukung secara kelembagaan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah di masing-masing daerah ini. Ketika para elite di daerah mengambil keputusan untuk mendukung salah satu kadernya dalam proses Pilkada, mereka mendapatkan legitimasi sikap tersebut dari elite Pimpinan Pusat yang masih menunjukkan sikap politik individunya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah. Jarak politik dan gesekan politik yang lebih terasa di daerah membuat elite di daerah lebih berani dalam mengambil aksi dukung-mendukung salah satu kader Muhammadiyah dalam politik elektoral.

Effendi (2015: 172-177), dalam bukunya yang berjudul “Politik Elit Muhammadiyah (Studi Tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah)” mendeskripsikan bahwa ada dua hal penting yang dihasilkan dalam

penelitiannya. Pertama spektrum fragmentasi politik elite Muhammadiyah. Kedua, sebab-sebab terjadinya fragmentasi ditubuh Muhammadiyah. Menurut David dan mungkin peneliti lainnya bahwa kemunculan kelompok dalam Muhammadiyah bukanlah hal yang baru. Namun, David meyakini seiring dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia ada hal yang perlu di revisi terkait varian kelompok yang terus beragam dan juga perilaku atau karakter politik yang tidak monoton, seragam dan monolitik.

Adapun varian tersebut antara lain: *Pertama* fundamentalis politik atau disebut juga kubu pragmatisme politik, kelompok ini direpresentasikan Din Syamsudin dan beberapa tokoh lainnya seperti Bambang Sudibya, Amien Rais, Imam Addaruqutni, Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, Muslim Abdurrahman dan sebagainya. *Kedua* kubu moderat pasif, kubu ini sering mengatakan ditempat umum bahwa Muhammadiyah dan dirinya adaah ummatan wasatban, berada ditengah-tengah umat dan tidak menghendaki perpecahan atau pertengakaran. Keyakinan mereka adalah dakwah lebih penting daripada urusan dunia politik. *Ketiga* kubu moderat aktif, bedanya dengan moderat pasif, kelompok ini aktif mencari, mengumpulkan berita dan menganalisanya sebagai bahan untuk menentukan pilihan politik sadarnya dan pengikutnya, yang termasuk dalam kelompok ini misalnya Yunahar Ilyas, Muhammad Muqodas, Zamroni.

*Keempat* kubu khittotisme, kelompok ini cenderung fleksibel tetapi mempunyai basis argument, perspektif dan prinsip. Mereka selalu menggunakan Khittah sebagai tolak ukur perjuangan dalam ranah politik.

Yang menonjol dalam kelompok ini adalah Haidar Nasir, Rosyad Sholeh dan beberapa elite Muhammadiyah diranah lokal. *Kelima* kelompok apolitis, kelompok ini ada dua macam, kelompok yang berteriak Muhammadiyah apolitis dan kelompok Muhammadiyah yang benar-benar apolitis, bahwa mereka tidak mau menuhankan politik dan fokus pada urusan ibadah dan fikih. David juga menyimpulkan dalam bukunya tersebut bahwa sebab terjadinya perkubuan atau perpecahan karakter politik dikalangan elite Muhammadiyah yaitu pertama kontinuitas sejarah, kedua intervensi ideologi asing, ketiga desain organisasi yang inklusif dan otonom, dan terakhir pragmatism politik elite.

Buku yang berjudul “Era Baru Politik Muhammadiyah” yang dieditori oleh Saeful Muhtadi (2005: 5-116), merupakan kumpulan tulisan dari beberapa orang yang aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah. Secara keseluruhan buku ini menjelaskan mengenai sikap Muhammadiyah dalam menghadapi politik pada masa setelah reformasi, khususnya menyikapi dukungan Muhammadiyah kepada Amin Rais selaku pimpinan Muhammadiyah sebagai calon presiden. Meskipun begitu dalam buku ini tetap ada pembahasan awal tentang keterlibatan Muhammadiyah dengan politik khususnya dijelaskan dengan partai politik Islam. Untuk itu buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melihat sikap Muhammadiyah dalam menghadapi politik dari awal Muhammadiyah berdiri hingga saat ini.

Mukhlis (2015: 35-36), dalam penelitiannya tentang “Perilaku Politik Elit Keagamaan dalam Politik Lokal” memaparkan varian perilaku elit Muhammadiyah terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Banyuwangi. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Muhammadiyah dalam membaca persoalan politik lokal, berpijak pada dokumen kepribadian Muhammadiyah yang didalamnya terdapat panduan ideologis dalam menghadapi situasi politik. Dengan demikian para elit Muhammadiyah terkadang memiliki kepentingan pragmatis masing-masing. Oleh karena itu, diantara elit yang satu dengan yang lain memiliki pilihan politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik itu jelas dalam koridor etis pilihan rasional dan nilai-nilai moral Muhammadiyah.

Setiawan (2013: 7-8), dalam jurnalnya tentang “Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik Nasional Pasca Orde Baru Tahun 1998-2010” menjelaskan bahwa Muhammadiyah lebih memosisikan dan menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan yang nonpolitik dan tidak memasuki dunia politik praktis, meskipun dalam perkembangannya memiliki keterlibatan tertentu dengan partai politik dan dalam batas tertentu aktif dalam kegiatan politik praktis. Politik praktis yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan politik yang bersifat langsung dalam perjuangan kekuasaan untuk memperebutkan posisi politik di pemerintahan.

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan dengan menampilkan wujud Islam kultural lebih memilih bergerak

dalam lapangan tabligh, pendidikan, dan pembinaan kesejahteraan sosial melalui amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sifat pembaharuannya, Muhammadiyah menjadi golongan yang sadar akan kemajuan tetapi konservatif dalam mempertahankan kepribadiannya. Sikap dasar Muhammadiyah yang lebih banyak memainkan fungsi politik tidak langsung dengan melakukan *lobbying* dan pendekatan-pendekatan.

Sikap politik Muhammadiyah yang akomodatif menjadi pilihan karena menjauhi konfrontasi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip gerakannya. Kecenderungan politik yang demikian mencerminkan sikap yang lunak dalam berdakwah secara struktural, ruang dialog yang terbuka dengan penguasa, membuat nilai tawar Muhammadiyah diperhitungkan tanpa terperangkap dalam kekuasaan. Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang merupakan bentuk dari eksistensi Muhammadiyah dan keberadaannya sangat penting untuk membantu pemerintah dan bukan menjadi pesaing dari pemerintah, antara pemerintah dan Muhammadiyah berjalan beriringan dan saling membantu guna mencapai tujuan bersama.

Nurmandi dkk (dalam Qodir, 2015: 114-137), tentang “Politik Elektoral Muhammadiyah di Aras Lokal (Di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Maros)” menjelaskan bagaimana sejarah politik Indonesia sebelum era demokratisasi, warga Muhammadiyah aktif diberbagai partai politik. Muhammadiyah sebagai organisasi juga mendorong warganya untuk memilih dalam pemilihan umum, dengan kapasitas mobilisasi yang terbatas. Namun, di era liberalisasi justru logika kelembagaan ini menampakkan fakta yang berbeda ditingkat lokal.

Secara organisasi, Muhammadiyah secara formal memainkan peran aktif politik electoral dalam pemilihan kepala daerah. Artinya, Muhammadiyah sebagai entitas Civil Society wajar apabila mengambil bagian dari proses politik baik di level lokal maupun nasional.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa kasus Muhammadiyah di Sleman dan Maros memberikan tiga jenis motif perilaku politik electoral Muhammadiyah. Pertama, ditemukan argument yang kuat mengarah kepada kecenderungan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam politik local adalah menjaga “identitas” paham keagamaan sekaligus nilai-nilai lokalitas yang diyakininya. Kedua, apa yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Maros adalah fenomena elit untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal. Pragmatisme politik sebagai salah satu jalan yang dipilih sebagian elite Muhammadiyah dikontekstualisasikan pada peluang demokratisasi dan desentralisasi di aras lokal. Ketiga perilaku elit Muhammadiyah dapat dilihat sebagai mobilisasi sentiment aliran atau agama atau ideologi untuk membangun nilai tawar kepada kekuatan politik atau agama diluarnya dan untuk mengkonsolidasikan keyakinan pada jamaahnya.

Bahtiar Effendy tentang “Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah” dalam Qodir (2015: 7-18), menggambarkan tentang konsistensi dan tajdid politik Muhammadiyah. Dijelaskan oleh bahtiar bahwa konsistensi itu penting. Memepertahankan yang lama dan baik adalah kewajiban. Namun, bertajdid terhadap hal-hal baru yang lebih relevan adalah tanda kehidupan yang progresif dan berkemajuan. Semangat tersebut belum dikelola dengan



baik oleh Muhammadiyah. Dipaparkan bahwa Muhammadiyah masih gamang untuk bergerak melampaui bidang-bidang konvensional yang digelutinya selama ini. Hal tersebut menjadi suatu masalah bagi Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki banyak kader yang mempunyai panggilan (calling, beruf) dibidang politik. Akan tetapi, Muhammadiyah belum mampu mengelolanya dengan baik panggilan politik yang dimiliki oleh warganya. Dengan begitu, alih-alih mendatangkan manfaat bagi organisasi, justru malah sebaliknya yaitu konflik dan beda kepentingan yang diakibatkan oleh persebaran dan pembiaran anggota Muhammadiyah di organisasi-organisasi politik yang ada. Persyarikatan ini hanya melibatkan diri dalam politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar atau politik kenegaraan dan bukan dalam politik kepartaian, partisan atau praktis dan sering tidak memiliki kesatuan sikap dan pandangan. Bahtiar dalam tulisannya tersebut tidak mengharuskan Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik. Hal yang ditekankan adalah kesediaan untuk terus bertajdid, memperbarui diri dan tidak menghindar dari masalah. Diluar persoalan pendidikan, kesehatan dan ekonomi umat yang sebenarnya masih memiliki masalah, politik juga merupakan salah satu sumber masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Muhammadiyah diharapkan bisa mengelola dengan baik persoalan politik yang terjadi di era sekarang.

Harianto (2005: 128-130) dalam skripsinya tentang “Analisis Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden Putaran I dan II (Studi Kasus di Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta)” menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Sidang Tanwir Denpasar tahun 2002 dan Sidang Tanwir Makassar tahun 2003 telah menyepakati untuk mendukung Amien Rais untuk maju sebagai calon Presiden. Akhirnya pada sidang pleno di Yogyakarta pada 9-10 Februari, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan yang senada. Dalam hal ini suara PAN adalah modal pertama, sedangkan Muhammadiyah adalah modal utama. Dengan modal utama itu warga Muhammadiyah yang aktif dipartai politik lain beserta para elemen reformis lainnya, diharapkan memberikan suara pada Amien Rais pada pemilihan Presiden. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mendukung Amien Rais karena dekatnya hubungan Amien Rais dengan Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta dan sangat sulit bagi Amien Rais untuk dapat bersaing dalam pemilu Presiden kalau hanya mengandalkan PAN sebagai mesin politik. Karena Pimpinan Muhammadiyah melihat akan lebih efektif sosialisasi Muhammadiyah daripada PAN. Sehingga Muhammadiyah merasa pada mendukung Amien Rais walaupun kemungkinan seluruh warga Muhammadiyah sendiri belum tentu akan memilih Amien Rais, mengingat warga Muhammadiyah sangat rasional dalam berfikir.

Agar dapat memenangkan pasangan Amien Rais, Muhammadiyah bersama organisasi dibawahnya membuat dua strategi kampanye yaitu :

- a) Strategi internal Muhammadiyah dalam memenangkan Amien Rais agar dapat menggalang dukungan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta melakukan koordinasi secara intensif dengan Pimpinan-

Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Ortom tingkat Wilayah dan Pimpinan Ortom Tingkat Cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersama-sama mensukseskan Amien Rais.

- b) Strategi eksternal Muhammadiyah dalam memenangkan Amien Rais
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah merasa perlu adanya kerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya baik itu partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama yang berbasis Islam. Koordinasi yang dilakukan Muhammadiyah dengan partai politik berbasis Islam yaitu DPW PAN, DPW PKS, DPW PPP, DPW PBB dan DPW PBR. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi berbasis Islam yaitu Pengurus Forum Ukhuwah Islamiyah Yogyakarta, Pengurus Dewan dakwah Islamiyah Yogyakarta, Pengurus Dewan Masjid Indonesia Islamiyah Yogyakarta, Pengurus PDHI Yogyakarta, DPW Perti Yogyakarta, Pengurus Wilayah Al-Isyrad Yogyakarta, dan Pimpinan Jama'ah Ahmadiyah Yogyakarta. Serta melakukan koordinasi dengan partai-partai nasionalis yaitu DPW PNBK, DPW PBSB, DPW PNI Marhaenisme, dan DPW Partai Merdeka. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah juga melakukan koordinasi dengan HKTI Yogyakarta.
- c) Seluruh kekalahan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo pada pemilu presiden putaran I, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

secara struktural tidak mengambil kebijakan apapun, terutama untuk mendukung pasangan yang telah lolos masuk dalam pemilu presiden putaran II, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dan Pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi. Adanya kecenderungan untuk memilih Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kepentingan dari individu warga Muhammadiyah.

Alhamdi (2012: 194-196) dalam penelitiannya tentang “Dinamika Islam dan Elit-Elit Politik Muhammadiyah Peiode 1998-2010” menjelaskan sikap politik elite Muhammadiyah dalam merespon dinamika antara Islam dan Politik. Terdapat tiga isu yang dijadikan analisa yaitu pertama gagasan negara Islam, khususnya tentang keinginan pengembalian Piagam Jakarta dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 saat Sidang Tahunan MPRRI 2000-2002. Kedua, lahirnya partai-partai Islam setiap menjelang pemilu. Ketiga, fenomena terorisme yang selalu disalahpahami oleh masyarakat umum dan umat islam pada khususnya.

Selain itu penelitian ini juga memaparkan tentang politik kaum modernis di era reformasi yang direpresentasikan oleh elit-elit Muhammadiyah. Sifat politik tersebut tidaklah tunggal melainkan variatif. terdapat 4 variasi sikap politik kaum modernis tersebut. *Pertama*, Transformatik-Idelaistik yaitu sikap yang segala bentuk perjuangan politik Islam, semuanya harus didasarkan pada penyelesaian problem sosial, seperti mengentaskan kemiskinan, melawan korupsi, dan memperbaiki sistem pendidikan. Pemikiran dan aksi-aksinya lebih senang diwujudkan kedalam Lembaga Sosial (LSM) dengan program-

program pemberdayaan masyarakat atau Community Empowering serta menuangkan ke dalam tulisan-tulisan yang produktif. Elit yang tergabung dalam kelompok ini dekat dengan kalangan pemikir dan aktivis Islam progresif dan Islam Liberal. Elit yang termasuk dalam varian sikap tersebut yaitu Syafii Maarif, Dawam Rahardjo, Munir Mul Khan, Amir Abdullah, Haedar Nasir dan Sudibyo Markus. *Kedua*, Moderat-Idelistik yaitu politik Islam tetap diperlukan, tetapi harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sikap ini tidak berpihak pada salah satu titik ekstrem, sikap baik eksklusif maupun inklusif. Kelompok ini menolak cara-cara yang serba simbolik, kekerasan, maupun terror. Kelompok ini dikenal juga sebagai mubaligh, namun disinyalir dekat dengan aktivis-aktivis Islam semisal HTI, MMI, FPI, PKS dan lain lain. Elit yang termasuk dalam sikap tersebut yaitu Asjmundi Abdurrahman, Yunahar Ilyas, Muhammad Muqoddas, dan Goodwil Zubir.

*Ketiga*, Realistik-Kritis yaitu lebih mengedepankan falsafah politik garam daripada politik gincu/lipstick dan menolak dengan tegas cara-cara yang bersifat simbolik maupun kekerasan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural tidak memungkinkan hadir gagasan negara Islam. Semua elit yang tergabung dalam kelompok ini bekerja sebagai birokrat (PNS) diberbagai institusi pemerintahan, bahkan sebagian dari mereka mantan pejabat public. Elite yang termasuk dalam sikap ini yaitu Amien Rais, Malik Fadjar, Yahya A. Muhaimin, Ismail Sunny, Watik Pratiknya, Sukriyanto AR, Dahlan Rais dan Muchlas Abror. *Keempat*, Akomodatif-Pragmatis yaitu selalu menunjukkan sikap-sikap akomodatif dan kooperatif dengan semua pihak,

karena itu kelompok ini tidak pernah berpihak ekstrim dengan siapapun. Jika dilakukan akan merugikan secara politik. Sikap ini cenderung mencari momentum atau peluang politik untuk menarik simpati dari kalangan islam dan memiliki orientasi kekuasaan. Elite yang tergabung dalam kelompok ini mantan dan masih menjadi politisi Golkar, kedua-duanya juga mantan elite Pemuda Muhammadiyah. Elite tersebut yaitu Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Tohari. Terjadinya varian sikap politik tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor yang dapat dikategorisasikan dalam dua hal yaitu yang pertama kategori latar belakang sosiologis elite, dan yang kedua latar belakang kategori organisatoris.

#### **F. Landasan Teori**

Menurut Sangaribun (1989: 37) teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis suatu fenomena tertentu dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sedangkan menurut Koencoroningrat (1991: 14) bahwa teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pijakan dalam penelitian ini adalah :

## **1. Netralitas Politik**

Netralitas berasal dari kata netral, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata netral berarti keadaan tidak memihak, bebas dari pengaruh. Netralitas menurut Falakh dkk (2001: 172), dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak secara aktif dan pasif member dukungan pada kelompok atau partai politik yang memiliki kepentingan dalam kemenangan pemilu. Lebih lanjut Siagian mengatakan bahwa netralitas tidak boleh diinterpretasikan sebagai sikap "membabi buta", misalnya jika terjadi pergantian partai politik yang memegang tampuk pemerintahan karena menang dalam suatu pemilihan umum dan partai politik tersebut menentukan suatu kebijakan yang berakibat pada perubahan radikal dalam hal eksistensi negara, teori modern mengajarkan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh netral terhadap kebijakan demikian. Jika eksistensi dan keutuhan negara sebagaimana dimaksud oleh para pendiri negara terancam, aparatur pemerintah justru tidak boleh bersikap netral melainkan harus berada di garis depan untuk membela dan menjamin keutuhan negara (Siagian, 2001: 135).

Menurut Oppenheim (dalam Wiranto, 1989: 30), istilah netralitas (neutrality) berasal dari bahasa latin "neuter", dan mendefinisikannya sebagai suatu sikap yang tidak memihak yang diambil oleh negara-negara ketiga terhadap negara-negara yang berperang, suatu sikap yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara negara-negara yang tidak berperang dengan negara-negara yang berperang.

“Neutrality may be defined as the attitude of impartiality adopted by third states towards belligerents and recognized by belligerents, such attitude creating rights and duties between the impartial states and the belligerents”.

Menurut Roeslan Abdulgani, netralitas pada hakikatnya bermaksud membendung kekuatan disintegrasi dari luar dan menumbuhkan serta mengembangkan kekuatan integrasi dari dalam diri sendiri. Untuk itu perlu dipenuhi beberapa syarat, antara lain jiwa “self-reliance”, yaitu jiwa percaya kepada kekuatan sendiri dan berani hidup berdikari terutama di bidang ketahanan nasional dan regional (Abdulgani, 1979; 81).

Starke memberi batasan mengenai netralitas sebagai suatu sikap suatu negara yang tidak turut berperang dengan negara-negara yang berperang dan tidak ikut serta dalam permusuhan

“Neutrality denotes the attitude of a state which is not at war with belligerents and does not participate in the hostilities” (Starke, 1984: 549)

Definisi yang dikemukakan oleh Starke dapat dikatakan memperluas pengertian netralitas menurut Oppenheim, karena selain mencakup sikap tidak ikut berperang juga tidak ikut serta dalam permusuhan. Definisi yang dikemukakan Roeslan Abdulgani memusatkan pengertian netralitas kepada suatu bentuk penangkalan terhadap kekuatan disintegrasi dari diri sendiri. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa pengertian netralitas itu berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dalam kawasan yang bersangkutan (Wiranto, 1989: 31).



Perkembangan konsepsi netralitas tersebut membawa suatu ciri khusus pada netralitas. Ciri-ciri khusus tersebut dikemukakan oleh Oppenheim (dalam Wiranto, 1989: 31), adalah sebagai berikut:

- a. Netralitas sebagai sikap tidak memihak berarti tidak mengizinkan bantuan dan sokongan terhadap salah satu pihak yang berperang yang merugikan pihak lainnya atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak serta merugikan pihak lainnya.
- b. Pihak-pihak netral harus mencegah pihak-pihak berperang agar tidak menggunakan wilayah serta sumber-sumber kekayaannya. Penerapan hal tersebut tidak hanya terhadap perang sesungguhnya di wilayah netral tetapi juga pengangkutan tentara-tentara, bahan-bahan perang, keperluan-keperluan tentara dan lain-lain. Hal itu merupakan tindakan aktif pihak-pihak netral selama peperangan
- c. Sikap tidak memihak yang diinginkan, tidak bertentangan dengan simpati pada satu pihak dan penolakan terhadap pihak lainnya selama sikap tersebut tidak dinyatakan dalam tindakan yang melanggar sikap tidak memihak. Mengenai tindakan kemanusiaan sebagai bagian netral seperti pengiriman rumah sakit militer beserta dokter-dokter, obat-obatan, keperluan perawatan untuk para tawanan tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang memihak. Sekalipun tindakan yang memberi kemudahan atau kenyamanan tersebut hanya untuk para tawanan salah satu pihak saja.

- d. Netralitas sebagai sikap yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tidak mempunyai eksistensi selama masa damai.
- e. Hubungan antara pihak-pihak yang berperang dengan pihak netral tidak rusak seluruhnya jika pecah perang. Hubungan itu tetap seperti sebelum pecah perang dan ditetapkan dalam hal bekerjanya traktat, hubungan diplomatik serta perdagangan.

Menurut Kusumohamidjojo (1985: 34-36), netralisme adalah istilah poliologis yang digunakan untuk menandai konsepsi yang lebih terkenal dengan istilah “politik nonblok”. Dengan konsepsi ini, yang bermula dikembangkan di Asia atau lebih tegasnya di India negara-negara muda yang tegak setelah selesai perang dunia II mencoba untuk berdiri diluar pertikaian ideologis antara blok negara-negara komunis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Netralisme mendapat pijakan di Asia Tenggara sejak awal perkembangannya, sampai tahun 1965 Indonesia sempat mendapat predikat “Netralis yang Militan”.

Setelah perang dunia II berakhir, konsepsi netralitas dikembangkan menjadi netralitas yang permanen, artinya konsepsi itu tidak hanya dimaksudkan untuk diterapkan dalam keadaan perang, melainkan juga dalam keadaan tidak perang. Netralitas atau netralisme dalam konsep negara merupakan alat untuk mencapai tujuan, diaman suatu negara melalui politik tidak memihak atau berusaha untuk tidak melibatkan dirinya dalam perang dingin ataupun perang panas. Dalam permasalahan lain, netralisme juga menunjukkan semakin banyak percabangan yang

semakin lama menggabungkan arti dari politik tidak memihak itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa kelompok atau individu perlu berhati-hati untuk menggunakan netralitas sebagai instrument politik. Netralitas dapat diartikan sebagai sikap atau keadaan yang tidak memihak terhadap suatu kepentingan dalam memperoleh suatu kekuasaan di suatu negara (Kusumohamidjojo, 1985: 34-36)

Politik menurut Budiardjo (2008: 4) berasal dari kata polis yaitu negara. Secara etimologis berbicara tentang politik berarti sama artinya dengan berbicara tentang negara. Pembahasan soal politik memang menjadi kajian yang kompleks. Namun, para ahli sepakat pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan public (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Definisi politik dalam Maulana (2004: 408) adalah ilmu negara atau tata negara; sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk mempengaruhi kebijakan.

Menurut Nimo (1989: 8-9) politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana membagikan nilai-nilai oleh pihak yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam tersebut, ada penyesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang, politik adalah kegiatan, dan

politik adalah kegiatan yang dibedakan (meskipun tidak selalu berhasil) dari kegiatan lainnya seperti Ekonomi, keagamaan dan sebagainya.

Menurut Nashir politik itu rumit, selain faktor konflik, sifatnya juga tidak linier. Sebagaimana tentang sikap non-partisan Muhammadiyah yang sering disebut netral politik. Konsep netral politik jangan dimaknai secara harfiah. Netral yaitu memiliki makna tidak memihak dan tidak memiliki afiliasi pada partai atau kekuatan politik tertentu sebagai sikap dasar Muhammadiyah. Netral dalam makna berjarak, sering disebut “mengambil jarak yang sama” (sebuah istilah yang berkembang di kalangan warga Muhammadiyah, tetapi sesungguhnya tidak ada dalam pemikiran resmi, mengandung pengertian “*disangegement*” yaitu mengambil jarak dengan tidak menjadi partisan politik dan menghimpitkan diri dengan kekuatan atau partai politik, terlepas apakah jarak itu dekat atau jauh, itu tidaklah bersifat fisik, tetapi bersifat posisi non-afiliasi dan tidak partisan politik sesuai Khittah. Jarak jauh maupun dekat bukan serba verbal dan fisik layaknya ukuran meteran. Jika jauh jangan menjadi anti-politik, sebaliknya jika dekat jangan berhimpitan seperti melakukan “khalwat politik”. Dalam memaknai jarak politik itu juga memerlukan ketangkasan, kearifan, kecerdasan, sekaligus kejujuran dari para elit dan warga Muhammadiyah sesuai dengan patokan dasar Khittah dan kemaslahatan Muhammadiyah (Nashir dalam Qodir dkk, 2015: 2015).

Dalam memaknai netralitas, berkembang istilah atau idiom baru seperti “netralitas aktif dan “menjaga kedekatan yang sama” sebagai antithesis

terhadap Khittah yang bersifat “netral-pasif” dan “menjaga jarak yang sama” terhadap dunia politik (Nashir, 2008: 3). berikut ini bentuk-bentuk netralitas yang dapat mengkategorisasikan suatu aktivitas politik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia:

- a. Netralitas aktif, aktif secara bahasa diartikan sebagai suatu sikap bereaksi dan beraksi. Dalam konteks politik, maka netralitas aktif diartikan sebagai suatu bentuk sikap tidak berpihak, akan tetapi tetap berusaha untuk menggunakan hak pilih nya di dalam politik, kemudian mendorong yang lain untuk tidak golput dalam berdemokrasi.
- b. Netralitas semu, semu secara bahasa diartikan sebagai sikap atau wujud yang terlihat seperti asli, akan tetapi sebenarnya tidak asli. Dalam konteks politik, artinya netralitas semu adalah suatu sikap yang wujud nya terlihat tidak mendukung atau berpihak, akan tetapi sebenarnya mendukung atau memihak dalam politik.
- c. Netralitas pasif, pasif secara bahasa adalah suatu sikap yang tidak aktif, menerima saja, dan tidak giat (berusaha), jika dikontekskan dalam politik maka netralitas pasif adalah suatu sikap yang tidak berpihak kepada siapapun, atau tidak terlibat dalam hal apapun, cenderung diam, atau tidak mau tau tentang politik. Jika diistilahkan oleh Talcott Parson (1951) dalam ciri-ciri masyarakat modern adalah “netralitas efektif”, yaitu suatu sikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya

dengan kepentingan pribadinya, dan tidak memperdulikan keadaan sekitarnya.

## **2. Gerakan Politik**

Gerakan berasal dari istilah kata “Gerak” yang memiliki arti yaitu tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Gerakan merupakan aspek dinamis dari kehidupan politik, karena itu gerakan sering terjadi di dalam bentuk masyarakat apapun, utamanya masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosio-ekonomi, budaya dan politik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 769).

Secara etimologi gerakan adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial, budaya, atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial (Widyanta, 2002: 12).

Dalam sosiologi, gerakan tersebut diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perilaku kolektif tertentu yang diberi nama gerakan sosial. Sejumlah ahli sosiologi menekankan pada segi kolektif dan gerakan sosial ini, sedangkan di antara mereka ada pula yang menambahkan segi

kesengajaan, organisasi dan kesinambungan. Menurut Thoha sebagai sebuah aksi kolektif, umur gerakan sosial tentu sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan “damai” bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau yang lebih dikenal dengan istilah gerakan sosial sekarang ini (Thoha, 1995: 63)

Menurut Winardi pengertian gerakan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Gerakan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan bersama dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan budaya organisasi (Winardi, 2000: 47)

Menurut Budiardjo (2008: 382-383) dalam kehidupan politik, dengan berkelompok maka kepentingan mereka akan lebih didengarkan dan kelompok ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan dalam perkembangannya kelompok ini berubah menjadi gerakan sosial. Suharko (2006:3) mengatakan gerakan sosial adalah tindakan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan jenis gerakan sosial yang beragam.

Dari pengertian ilmuwan ini dapat ditarik pemahaman bahwa gerakan politik pemimpin adalah berhubungan dengan proses mempengaruhi dari

seseorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna mencapai tujuan organisasi organisasi dimana terdapat seni mengatur, mengelola, dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama, semangat dan potensi-potensi yang ada guna mencapai tujuan yang dicita-citakan (Hodari, 2015: 33).

Dalam melakukan kajian terkait gerakan, perlu adanya pembedaan yang signifikan antara gerakan yang bersifat struktural atau administratif dengan gerakan yang lebih mengarah pada gerakan politik. Oleh karena itu perlu ditegaskan kembali dalam penelitian ini, bahwa harus memahami pengertian tentang gerakan seorang pemimpin. Pada dasarnya gerakan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, gerakan seorang pemimpin merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif (Surbakti, 1990: 134).

Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, gerakan seorang pemimpin lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama gerakan maupun para pengikutnya. Oleh karena itu, gerakan politik pemimpin juga berbeda dengan elit politik, elit ialah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling tinggi didalam masyarakat, seperti prestise, keyakinan, ataupun kewenangan, memiliki kekuasaan



politik berbeda dengan memiliki gerakan politik pemimpin, karena dua hal yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh (Surbakti, 1990: 134).

Menurut Hodari sebutan politik dalam gerakan politik menunjukkan gerakan seorang pemimpin berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk menapai tujuan tertentu (Hodari, 2015: 35)

Akan tetapi, orang yang secara formal menjadi elit politik atau kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan sebagai penggerak politik kalau memenuhi karakteristik gerakan pemimpin tersebut. penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya orang yang dapat menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai dengan konteks dan jenis permasalahan.

Selain itu, gerakan pemimpin juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) gerakan pemimpin sebagai pola perilaku. 2) gerakan

pemimpin sebagai kualitas personal. 3) gerakan pemimpin sebagai nilai politik. Gerakan pemimpin dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan-dukungan dari masyarakat yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Disamping itu, gerakan ini juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu member contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan melalui dakwahnya, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat dan mampu mendudukkan orang-orangnya di posisi strategis di lembaga-lembaga politik kenegaraan yang ada. Gerakan seorang pemimpin juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Seorang pemimpin politik harus paham tentang etika politik sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab (Alfian, 2009: 12).

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Menurut Haryanto (1984: 81) pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya guna menduduki jabatan tertentu. Menurut Sorensen (2003; 1) pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena

salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 sampai Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin di daerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 24 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada tercermin dalam cara pemilihan dan asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan :

“Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Leo (2015: 2) bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun ketentuan ini berubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang. Pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

- a. Langsung yaitu rakyat yang berkedudukan di daerah sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara
- b. Umum berarti seluruh warga negara berhak menggunakan hak memilihnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005. Bersifat umum adalah mengandung makna bahwa menjamin kesempatan seluas-luasnya bagi warga Negara tanpa memandang perbedaan.
- c. Bebas bahwa setiap warga Negara yang ditetapkan sebagai pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- d. Rahasia yaitu dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin tidak akan diketahui pilihannya oleh siapapun.
- e. Jujur adalah dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, pasangan calon, aparat pemerintah, partai politik, pengawas pemilihan, pelaksana pemilihan dan pihak-pihak lainnya harus bersikap jujur.

- f. Adil adalah penyelenggara pemilihan dan pihak-pihak yang terkait harus bersikap adil terhadap pemilih dan pasangan calon.

### **G. Definisi Konseptual**

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, berikut ini dijabarkan tentang beberapa definisi konseptual dan definisi operasional yang terkait dengan penelitian.

#### **Netralitas Politik**

Netralitas politik yang akan dilakukan didalam penelitian menurut Falakh diartikan sebagai sikap tidak secara aktif atau pasif memberikan dukungan pada kelompok atau partai politik tertentu untuk memperoleh kepentingan kekuasaan disuatu negara. Netralitas juga diartikan sebagai sikap tidak terlibat didalam politik praktis atau menjadi tim pemenang dalam proses pemilihan umum.

### **H. Definisi Operasional**

Netralitas politik Muhammadiyah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 diukur dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Netralitas Politik**

Variabel	Indikator	Parameter
	Sikap tidak secara aktif atau pasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan Pimpinan Daerah</li> </ul>

Netralitas Politik	memberikan dukungan kepada salah satu kandidat tertentu	<p>Muhammadiyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses kampanye</li> <li>• Tidak melakukan koordinasi baik secara tertutup maupun terbuka kepada partai atau kandidat calon tertentu</li> </ul>
	Tidak menjadi tim sukses salah satu kandidat calon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah baik secara kelembagaan atau individu tidak</li> </ul>

		<p>masuk dalam struktur tim sukses salah satu calon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak memberikan pernyataan baik secara resmi atau tidak resmi mendukung salah satu calon dengan mengatasmakan organisasi Muhammadiyah</li> </ul>
	<p>Tidak memiliki kepentingan kekuasaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak menerima tawaran politik baik berupa jabatan atau uang</li> </ul>



		<p>dari partai politik atau salah satu calon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki kesepakatan yang terikat pada partai atau salah satu calon dengan memberikan posisi strategis di bagian pemerintahan kota Yogyakarta ketika menang.</li> </ul>
--	--	---

## **I. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pertimbangan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang diperlukan, persepsi tentang realitas dan ketersediaan bahan serta didasarkan pula pada prinsip-prinsip teoritis dan metodologis maka penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 6), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian. perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan daripada penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek penelitian dan juga mengetahui fenomena perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang terjadi dalam proses penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*).

Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya. Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun

studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah tentang menguji netralitas politik Muhammadiyah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta 2017.

## **2. Obyek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dengan tema menguji netralitas politik Muhammadiyah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, lokasi yang diambil adalah kepengurusan Muhammadiyah yang berada di Kota Yogyakarta atau biasa disebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah, serta beberapa lokasi yang sesuai dengan tema penelitian.

## **3. Unit Analisis Data**

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis data adalah para pengurus Muhammadiyah dan orang atau lembaga yang berkaitan dan berkepentingan baik secara langsung dan tidak langsung dengan Muhammadiyah. Sedangkan informan kunci pada penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

#### **4. Sumber Data**

Menurut Arikunto (2002: 96) data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Lofland (dalam Alhamdi, 2012: 37) sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder, meliputi dokumen dan lain-lain.

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang umumnya terdapat didalam laporan Muktamar Muhammadiyah, peraturan-peraturan, perundang-undangan, sumbangan-sumbangan dari Muhammadiyah, siaran pers, majalah, surat kabar, jurnal, buku-buku, literature dan dokumen-dokumen lainnya. Disamping itu, data yang didasarkan hasil wawancara juga termasuk dalam data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang tersusun dari dokumen-

dokumen (tapi tidak langsung) melalui buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **a. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi menurut Arikunto (2002: 206) yaitu mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari arsip-arsip atau catatan-catatan yang terdapat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta serta Suara Muhammadiyah sebagai pendukung.

### **b. Wawancara**

Menurut Harrison (dalam Alhamdi, 2012: 38) metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif kontemporer yang belum pernah dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Ada empat tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara sebagaimana dikemukakan Burnham dkk (2004: 206), (1) menentukan siapa yang akan diwawancarai, (2)

mendapatkan akses dan mengatur proses wawancara, (3) melakukan wawancara, (4) menganalisis hasil wawancara.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian, yang dalam hal ini responden untuk dilakukan wawancara yaitu dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, serta responden lain yang dirasa perlu untuk dilakukan wawancara pada penelitian ini. Wawancara juga memerlukan pola yang fleksibel dan mereka benar-benar memahami permasalahan dan mendalami situasi dan informasi, sebab yang menjadi responden sebagian besar adalah tokoh-tokoh organisasi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Semua data yang sudah terkumpul baik berupa hasil wawancara, maupun dokumentasi ditelaah secara detail dengan menggunakan tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Sarkantos (dalam Alhamdi, 2012: 39-40):

- a. Reduksi Data. Tahapan ini digunakan untuk memilih dan memilah data yang sudah terkumpul secara cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
- b. Penyajian Data. Setelah proses pemilihan dan pemilahan data selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data

penelitian secara deskriptif dan detail sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Interpretasi Data. Proses yang terakhir yang tidak bisa dipisahkan adalah analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan sesuai dengan metode yang berlaku, lalu diuji validitasnya, sehingga mendapatkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan itulah yang disebut sebagai temuan baru.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tentang Muhammadiyah dan Netralitas Politik, bab I juga memaparkan tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian.

Bab II adalah bab gambaran umum, bab ini menjelaskan profil atau gambaran dasar atau obyek yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini memaparkan sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta, dan profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, bab ini juga

menampilkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta mulai dari proses pemilihan langsung sampai sekarang.

Bab III merupakan bab inti dari jawaban atas rumusan masalah penelitian. Pembahasan ini akan menganalisa pandangan dari beberapa pihak yang berada di structural Pimpinan Daerah Muhammadiyah, serta beberapa pihak yang terlibat dalam Pilkada Kota Yogyakarta, guna menguji netralitas politik Muhammadiyah di Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017

Kemudian yang terakhir bab IV. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dalam penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang sekiranya perlu dan menjadi gagasan keilmuan baik untuk obyek penelitian maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya.